

# **BAB I**

## **GAMBARAN UMUM**

### **1.1 PENDAHULUAN**

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan suatu kebijakan berkaitan dengan sistem pengendalian yang harus dibuat oleh Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dalam rangka menindaklanjuti kebijakan SPIP tersebut maka Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel wajib dilakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. SPIP diartikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui empat pilar, yaitu :

1. Efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan;
2. Keandalan laporan keuangan;
3. Pengamanan aset negara;
4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Konsep pengendalian intern tersebut menjadi panduan minimal bagi instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah dalam merancang pengendalian intern di sektor pemerintahan.

## **1.2 LATAR BELAKANG**

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan penerapan pengendalian intern, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, perlu disusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang digunakan sebagai acuan bagi para penyelenggara tugas dan fungsi organisasi, sehingga diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026.

Tujuan pembangunan daerah yang menjadi ampunan Kecamatan Pekuncen seperti yang tertuang dalam RPD Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan berdaya saing serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah. RTP ini diprioritaskan untuk pencapaian tujuan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

## **1.3 DASAR HUKUM**

Dasar hukum penyusunan Rencana Tindak Pengendalian pada Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas adalah:

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 3) Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman

Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah;

- 4) Peraturan Badan Pengawasan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
- 5) Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Penilaian Atas Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- 6) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;
- 7) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penilaian Risiko pada Perangkat Daerah.

#### **1.4 TUJUAN**

Tujuan penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Strategis untuk memberikan acuan Kecamatan Pekuncen dalam mengenali kondisi lingkungan pengendalian, risiko, dan tindakan pengendalian yang diperlukan untuk mencegah penyimpangan dan mempercepat keberhasilan pencapaian sasaran strategis organisasi.

#### **1.5 MANFAAT**

Manfaat penyusunan dokumen Rencana Tindak Pengendalian di lingkungan Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas antara lain sebagai berikut :

- 1) Sebagai dasar penyelenggaraan SPIP secara menyeluruh di

lingkungan Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas;

- 2) Sebagai dasar pendokumentasian, pemantauan dan pengukuran kemajuan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas ;

## **1.6 RUANG LINGKUP**

Rencana Tindak Pengendalian ini fokus kepada pengendalian atas sasaran strategis Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas berdasarkan pada Rencana Strategis Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan Pemerintah Kecamatan
2. Meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Kecamatan

Penentuan evaluasi lingkungan pengendalian Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas merupakan hasil rekapitulasi evaluasi lingkungan pengendalian yang telah dilakukan di seluruh bagian di lingkungan Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas. Sedangkan penilaian risiko merupakan hasil pemetaan dari risiko yang terpilih. Pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian melibatkan seluruh jajaran baik pimpinan maupun pegawai di lingkungan Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas.

## **BAB II**

### **SEKILAS TENTANG SPIP**

#### **2.1 PENGERTIAN SPIP**

Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Definisi SPI dan SPIP dipahami sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan pimpinan dan seluruh pegawai terintegrasi dengan kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi.

#### **2.2 TUJUAN SPIP**

Tujuan SPIP sebagaimana disebutkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

### 2.3 UNSUR-UNSUR SPIP

Penyelenggaraan SPIP meliputi unsur-unsur sistem pengendalian intern sebagai berikut, yaitu :

#### a. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan Pengendalian adalah kondisi yang dibangun dan diciptakan dalam organisasi yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Untuk mencapai kualitas lingkungan pengendalian yang efektif, perlu dikembangkan lingkungan pengendalian dengan :

- 1) Penegakan integritas dan nilai etika;
- 2) Komitmen terhadap kompetensi;
- 3) Kepemimpinan yang kondusif;
- 4) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- 5) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- 6) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- 7) Perwujudan peran aparat pengawas intern pemerintah yang efektif;
- 8) Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait;

#### b. Penilaian Risiko

Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian terhadap kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Kegiatan penilaian risiko dilaksanakan melalui aktivitas identifikasi risiko dengan menggunakan metodologi dan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko organisasi serta analisis risiko untuk menentukan pengaruh risiko yang telah teridentifikasi terhadap pencapaian tujuan organisasi.

c. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang dipandang tepat untuk dilakukan dalam rangka mengatasi risiko. Dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian, juga ditetapkan dan dilaksanakan kebijakan serta prosedur, guna memastikan bahwa tindakan yang dilakukan untuk mengatasi risiko telah bekerja secara efektif. Kegiatan pengendalian yang perlu dilaksanakan organisasi ditentukan berdasarkan hasil penilaian risiko dengan mempertimbangkan kecukupan pengendalian *existing*.

Kegiatan untuk mengendalikan risiko dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu *prevention* dan *mitigation*. Pengendalian yang bersifat *prevention* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa risiko. Sedangkan pengendalian yang bersifat *mitigation* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan apabila terjadi suatu peristiwa risiko.

d. Informasi dan Komunikasi

Informasi adalah data yang telah diolah dan dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Pimpinan organisasi dan seluruh jajaran manajemen harus mendapatkan informasi yang relevan dan dapat diandalkan, yang diperoleh melalui proses identifikasi dan distribusi dalam bentuk dan waktu yang tepat, agar mereka dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara efisien dan efektif.

Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dengan menggunakan media tertentu, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif. Dalam rangka penyelenggaraan SPIP, informasi dan komunikasi yang dikelola adalah informasi dan komunikasi yang dapat mengintegrasikan

pelaksanaan komponen-komponen SPIP secara efektif, terutama yang terkait langsung dengan pencapaian tujuan organisasi serta berhubungan dengan penilaian risiko dan pelaksanaan aktivitas pengendalian.

e. Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja Sistem Pengendalian Intern. Pelaksanaan pemantauan pengendalian intern dimaksudkan untuk memastikan bahwa sistem pengendalian intern sudah bekerja sesuai yang diharapkan dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal organisasi. Pemantauan pengendalian intern mencakup kegiatan penilaian atas desain dan pelaksanaan pengendalian intern, serta menghasilkan usulan tindakan perbaikan terhadap kualitas sistem pengendalian intern, yang dilaksanakan melalui tiga jenis kerangka pemantauan, yaitu pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Audit.

## 2.4 PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengamanatkan Menteri / Pimpinan Lembaga/ Gubernur / Bupati / Walikota/ Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN/APBD telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan ini dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan.

Pernyataan sebagaimana dikehendaki peraturan tersebut membawa konsekuensi perlunya dukungan fakta bahwa sistem



pengendalian intern memang sudah diselenggarakan secara memadai. Untuk meyakini keandalan sistem pengendalian intern yang ada, maka dipandang perlu menjalankan siklus penyelenggaraan SPIP setiap tahun, mulai dari identifikasi sasaran/tujuan sampai dengan pemantauan penyelenggaraan pengendalian, serta melakukan evaluasi atas efektivitas penyelenggaraan SPIP tersebut.

## **BAB III**

### **LINGKUNGAN PENGENDALIAN**

#### **3.1 LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN**

Lingkungan pengendalian adalah pondasi bagi unsur-unsur sistem pengendalian intern. Lingkungan pengendalian menentukan keberhasilan/ kegagalan penerapan SPI. Pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk:

- a. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
- b. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
- c. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
- d. Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Terwujudnya Satuan Pengawasan Intern di unit kerja yang berperan efektif; dan
- h. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

#### **3.2 KONDISI LINGKUNGAN PENGENDALIAN**

Kondisi lingkungan pengendalian Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas secara umum memadai. Penilaian terhadap kondisi lingkungan pengendalian dilakukan dengan hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas diperoleh gambaran sebagai berikut:

No	Sub Unsur	Kondisi
1	Penegakan integritas dan nilai etika	Memadai
2	Komitmen terhadap kompetensi	Memadai

No	Sub Unsur	Kondisi
3	Kepemimpinan yang Kondusif	Memadai
4	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Memadai
5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab	Memadai
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	Memadai
7	Perwujudan Peran APIP yang Efektif	Memadai
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi	Memadai

Survei persepsi yang telah dilaksanakan pada Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas melibatkan ASN pada Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas sebagai responden. Responden ditetapkan sebanyak 12 (duabelas) dari total ASN 12 (duabelas) terdiri dari pejabat struktural, fungsional tertentu, dan fungsional umum atau sejumlah 100%. Penetapan jumlah responden untuk memenuhi minimal responden sebanyak 30% telah terpenuhi. Berdasarkan survei persepsi pada 8 (delapan) sub unsur lingkungan pengendalian menunjukkan hasil bahwa semua sub unsur memadai.

Sedangkan berdasarkan review terhadap dokumen menunjukkan hasil bahwa terdapat satu sub unsur yang kurang memadai, yaitu sub unsur Perwujudan Peran APIP yang efektif. Pada sub unsur Perwujudan Peran APIP yang efektif menunjukkan kelemahan bahwa belum sepenuhnya memenuhi standar yang baik dan mewujudkan hasil yang berkesinambungan.

### 3.3 RENCANA PENGUATAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Dari hasil analisis lingkungan pengendalian (*Control Environment Evaluation*), kelemahan-kelemahan lingkungan

pengendalian yang perlu mendapat prioritas untuk diperbaiki, yaitu:

No	Sub Unsur/Rencana Tindak Perbaikan	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4
1	Perwujudan Peran Apip Yang Efektif		
	FGD dan monitoring evaluasi terhadap penyusunan dan penetapan SAKIP	Camat	Tahun 2025

Rincian penilaian kondisi Lingkungan Pengendalian dapat dilihat pada lampiran:

- Form 1A : Rekapitulasi hasil kuesioner penilaian lingkungan pengendalian intern Control Environment Evaluation (CEE)
- Form 1B : CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern di Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas
- Form 1C : Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas

## **BAB IV**

### **PENILAIAN RISIKO**

#### **4.1 PENETAPAN TUJUAN**

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui pengelolaan risiko strategis OPD. Tujuan dan sasaran pada RPD 2024-2026 mengacu pada Visi, Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahap Keempat pada RPJP Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025. Perumusan tujuan dan sasaran RPD Tahun 2024-2026 juga berdasarkan pada analisis terhadap isu-isu strategis dan aktual yang tengah berlangsung, serta menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025. Tujuan dalam RPD Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 diuraikan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih Efektif dan Berdaya Saing
2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah
3. Menangani Kemiskinan dan Pengangguran serta Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
4. Memperkuat Ketahanan Pangan

Keempat tujuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan dengan penetapan tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah. Berikut merupakan sasaran

strategis Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas sesuai dengan Renstra Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026:

Konteks	Sasaran Strategis	Indikator
<b>Risiko strategis</b>	Meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Kecamatan	Nilai SAKIP pemerintah kecamatan
	Meningkatnya kualitas pelayanan Pemerintah Kecamatan	Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan

Rincian penetapan konteks risiko dapat dilihat pada lampiran:

*Form 2B : Penetapan konteks risiko strategis Kecamatan Pekuncen*

#### 4.2 IDENTIFIKASI RISIKO

Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, juga disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko. Rincian identifikasi risiko ditunjukkan pada lampiran:

*Form 3.b : Identifikasi risiko strategis Kecamatan Pekuncen*

#### 4.3 ANALISIS RISIKO

Tahapan selanjutnya, hasil identifikasi risiko kemudian di

analisis menggunakan kriteria penilaian risiko dengan menentukan nilai kemungkinan dan dampak. Rincian hasil analisis risiko selengkapnya dapat dilihat pada lampiran form 4. Dari hasil analisis risiko tersebut diputuskan risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani yaitu risiko dengan nilai sedang sampai dengan sangat tinggi. Berikut adalah daftar risiko prioritas dari hasil analisis risiko Kecamatan Pekuncen:

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko
	<b>Risiko Strategis</b>		
1	Menurunnya nilai SAKIO	RSO 25.41.41	1
2	Adanya pungli dalam pemberian layanan kepada masyarakat	RSO 25.41.41	4
3	Adanya urusan yang belum tertangani secara optimal	RSO 25.41.41	1
4	Belum optimalnya pembangunan di wilayah kecamatan	RSO 25.41.41	4

Terhadap risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani, pemerintah daerah membangun pengendalian untuk menurunkan kemungkinan munculnya risiko (preventif), menurunkan dampak dari risiko yang muncul (mitigatif), atau keduanya. Rincian risiko prioritas dapat dilihat pada lampiran form 5.

Penilaian terhadap pengendalian mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi pemerintah dalam rangka mengelola risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektifitasnya yang ditunjukkan pada lampiran form 6 dan 7. Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara

lain jika:

- a. Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi;
- b. Prosedur pengendalian belum dilaksanakan;
- c. Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas;
- d. Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.



## **BAB V**

### **KEGIATAN PENGENDALIAN**

Setelah dicapai kesepakatan tentang perbaikan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan Rencana Tindak Pengendalian. Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP;

Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi risiko. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka membangun pengendalian meliputi:

- a. Mengumpulkan data berupa RTP, peraturan perundang-undangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan pengendalian yang akan dibangun;
- b. Unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang sistem pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila diperlukan;
- c. Membuat atau menyempurnakan pengendalian;
- d. Melakukan uji coba penerapan pengendalian;
- e. Menyempurnakan rancangan pengendalian berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba;
- f. Menetapkan penerapan pengendalian.

2. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian

Terhadap semua bentuk pengendalian yang telah dibuat, instansi pemerintah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati.

## **BAB VI**

# **INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

Setelah bentuk pengendalian yang akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada disepakati, Kecamatan Pekuncen perlu mengomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak terkait. Perlu diyakinkan bahwa informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait sesuai rencana pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Tindak Pengendalian. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam Rencana Tindak Pengendalian meliputi FGD, rapat koordinasi, konsultasi, studi komparatif, pameran dan sosialisasi.

Rincian rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian dimaksud tertuang dalam lampiran form 8.

## BAB VII

# PEMANTAUAN

Pemantauan atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan yang akan dilaksanakan tersebut meliputi:

1. Pemantauan atas implementasi pengendalian

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai bentuk pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Rancangan pemantauan atas implementasi pengendalian dilakukan dengan mengisi lampiran form 9.

2. Pemantauan kejadian risiko

Dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka pemerintah daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (*risk event*) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan. Pencatatan atas pemantauan kejadian risiko dilakukan dengan mengisi lampiran form 10.

## BAB VIII

### PENUTUP

Rencana Tindak Pengendalian Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas merupakan bagian dokumen penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mewujudkan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian ini menjadi instrumen untuk merencanakan dan memantau capaian perbaikan bentuk pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien dan mencapai tujuan. Pemantauan atas pelaksanaan RTP dan evaluasi atas efektivitas pengendalian yang ada akan menentukan efektifitas Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun. Komitmen dari seluruh pegawai serta ditunjang manajemen yang professional, efektif, efisien, transparan serta akuntabel diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengendalian penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Banyumas, 10 Febuari 2025

CAMAT PEKUNCEN  
KABUPATEN BANYUMAS



Drs. BOJONGUN, M.Si  
730207 199303 1003

*Formulir 1.A OPD Control EE*

No	Pertanyaan/ Kuisisioner	JAWABAN KORESPONDED (R)														KESIMPULAN KUOSIONER CEE
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	Modus		
A	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA															Memadai
1	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
2	Telah terdapat fungsi khusus di dalam OPD yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	Memadai
3	Pemkab/OPD telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai	4	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
4	Pegawai mendapatkan pesan integritas dan nilai etika secara rutin dari pimpinan Pemkab/OPD (misalnya keteladanan, pesan moral dll)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	Memadai
B	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI															Memadai
1	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Memadai

[RTP STRATEGIS KECAMATAN PEKUNCEN TAHUN 2025]

2	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	Memadai
3	OPD telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	Memadai
4	Standar kompetensi setiap pegawai/ posisi jabatan telah ditentukan	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	Memadai
<b>C</b>	<b>KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF</b>														<b>Memadai</b>
1	Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Pemda	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	Memadai
2	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	Memadai
3	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
4	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/ menggali pelaporan risiko/masalah	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Memadai

[RTP STRATEGIS KECAMATAN PEKUNCEN TAHUN 2025]

5	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
6	Rencana/sasaran strategis Pemda telah dijabarkan kedalam sasaran OPD dan tingkat operasional OPD	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	Memadai
7	Rencana strategis dan rencana kerja OPD telah menyajikan informasi mengenai risiko	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	Memadai
8	Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko	1	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	Memadai
<b>D</b>	<b>PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN</b>														<b>Memadai</b>
1	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	Memadai
2	Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh OPD dan unit kerja yang tepat	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
3	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Memadai



[RTP STRATEGIS KECAMATAN PEKUNCEN TAHUN 2025]

4	Pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat adhoc (sementara)	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	Memadai
<b>E</b>	<b>PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT</b>														<b>Memadai</b>
1	Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	Memadai
2	Kewenangan direviu secara periodik	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	Memadai
3	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	Memadai
<b>F</b>	<b>PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>														<b>Memadai</b>
1	OPD telah menginternalisasi budaya sadar risiko	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	Memadai
2	OPD telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	Memadai
3	Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	Memadai
4	Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	Memadai

[RTP STRATEGIS KECAMATAN PEKUNCEN TAHUN 2025]

5	Adanya pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	Memadai
6	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
7	OPD telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	Memadai
<b>G</b>	<b>PERWUJUDAN PERAN APIP YANG EFEKTIF</b>														<b>Memadai</b>
1	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko	3	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3	3	3	Memadai
2	Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
3	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
4	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
5	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas efisiensi/efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program Secara periodik	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Memadai

[RTP STRATEGIS KECAMATAN PEKUNCEN TAHUN 2025]

H	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT	Memadai															
1	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	Memadai
2	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/pemeriksaan (Inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Memadai

Data Koresponden							
No	Keterangan	No	Keterangan	No	Keterangan	No	Keterangan
R1	Camat Kecamatan Pekuncen [197302071993031003-drs. Rojingun,m.si] Hapus	R4	Pengadministrasi Umum [196911132008011011-irwan Nursetyo] Hapus	R7	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat [197305012009012001-yunike Meidet,s.pd] Hapus	R10	Penelaah Teknis Kebijakan [198810182015022001-ikhda Maulidiana Nur Hikmah S.e.] Hapus
R2	Sekretaris Kecamatan [198707152006021001-nugroho Fidy Nuraiska,s.stp] Hapus	R5	Pranata Komputer Terampil [198803302024211010-retno Laksono, A.md.] Hapus	R8	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat [197503122009012005-suhardjanti] Hapus	R11	Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan [197802242014062002-arie Indriyani,s.sos] Hapus
R3	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian [197809262010012003-sari Mulyani, S.a.p.] Hapus	R6	Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban [198805152007011002-pandu Rahandika,s.i.p.] Hapus	R9	Kepala Seksi Pemerintahan Desa [197202032008011010-darto, S.ap.] Hapus	R12	Pengelola Pengendalian, Monitoring Dan Evaluasi Pembangunan [196903172007011026-yustanto] Hapus

*Formulir 1.B OPD Control EE*

NO	Sumber Data	Kelemahan	Kekuatan	Unsur
1	LHE SAKIP	Belum sepenuhnya memenuhi standar yang baik dan mewujudkan hasil yang berkesinambungan	Evaluasi Kinerja internal telah dilaksanakan secara berkala, dokumen laporan kinerja telah disusun secara berkala	PERWUJUDAN PERAN APIP YANG EFEKTIF

*Formulir 1.C Control EE*

NO	Sub Unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
1	Penegakan Integritas Dan Nilai Etika	-	-	Memadai		-	
2	Komitmen Terhadap Kompetensi	-	-	Memadai		-	
3	Kepemimpinan Yang Kondusif	-	-	Memadai		-	
4	Pembentukan Struktur Organisasi Yang Sesuai Dengan Kebutuhan	-	-	Memadai		-	
5	Pendelegasian Wewenang Dan Tanggung Jawab Yang Tepat	-	-	Memadai		-	
6	Penyusunan Dan Penerapan Kebijakan Yang Sehat Tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia	-	-	Memadai		-	
7	Perwujudan Peran Apip Yang Efektif	Kurang Memadai	- Belum sepenuhnya memenuhi standar yang baik dan mewujudkan hasil yang berkesinambungan	Memadai		Memadai	- Belum sepenuhnya memenuhi standar yang baik dan mewujudkan hasil yang berkesinambungan
8	Hubungan Kerja Yang Baik Dengan Instansi Pemerintah Terkait	-	-	Memadai		-	

*Formulir 2. Penetapan Resiko Strategis*

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas	
Tahun Penilaian	: 2025	
Periode Yang dinilai	: RD 2024-2026	
Urusan Pemerintahan	: Unsur Kewilayahan	
OPD yang Dinilai	: KEC. PEKUNCEN	
Sumber Data	: Renstra 2024-2026	
Tujuan Strategis	1. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	
Sasaran Strategis	1. 1. Meningkatkan akuntabilitas pemerintah kecamatan	
	1. 2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan	
Indikator Kinerja Sasaran Renstra OPD	IKU	
	1	1.1.1 Nilai SAKIP pemerintahan kecamatan : 82.75 Nilai
	2	1.2.1 Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan : 100 %
Informasi Lain	-	
s Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	1 Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	
	1.1 Meningkatkan akuntabilitas pemerintah kecamatan	
	1.1.1 Nilai SAKIP pemerintahan kecamatan	
	1.1.XXX01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	1.2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan	
	1.2.1 Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan	

	1.2.70104 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
	1.2.70106 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
	1.2.70103 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Purwokerto, 10 Febuari 2025

KEPALA KEC. PEKUNCEN

BANTEN BANYUMAS



ROJINGUN, M.Si

Pembina Tingkat I

19730207 199303 1 003

*Formulir 3. Identifikasi Resiko*

NO	Tujuan	NO	Sasaran Strategis	NO	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak		SKPD
						Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena	
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Berkualitas	1	Meningkatkan akuntabilitas pemerintah kecamatan	1	Nilai SAKIP pemerintahan kecamatan	Menurunnya nilai SAKIP		7.01E+12	Belum Tersusunnya SOP Evaluasi Kinerja Harian	Internal	C	Pelaksanaan Evaluasi kurang memadai dikarenakan tidak adanya standar /pedoman yang jelas	Kecamatan Pekuncen	KEC. PEKUNCEN
		2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah Kecamatan	2	Persentase capaian kinerja pelayanan pemerintah kecamatan	Adanya pungli dalam pemberian layanan kepada masyarakat		7.01E+12	Penyalahgunaan wewenang dalam melaksanakan tugas PPATK	Internal	C	Ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja kecamatan	Pemkab, Kecamatan dan Masyarakat	KEC. PEKUNCEN
						Adanya urusan yang belum tertangani secara optimal		7.01E+12	Bertambahnya beban kerja pelayanan diluar tus/kewenangan	Internal	C	Ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja kecamatan	Pemkab, Kecamatan dan Masyarakat	KEC. PEKUNCEN
						Belum optimalnya pembangunan di wilayah kecamatan		7.01E+12	Pengalokasian anggaran terbatas dan belum sesuai dengan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan	Internal	C	Ketidakpuasan masyarakat terhadap pembangunan di wilayah Kecamatan	Pemkab, Kecamatan dan Masyarakat	KEC. PEKUNCEN



*Formulir 4. Analisis Risiko*

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko				Skala Dampak *)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
1	Menurunnya nilai SAKIP	RSO.25		41	41	1	1	1
2	Adanya pungli dalam pemberian layanan kepada masyarakat	RSO.25		41	41	2	2	4
3	Adanya urusan yang belum tertangani secara optimal	RSO.25		41	41	1	1	1
4	Belum optimalnya pembangunan di wilayah kecamatan	RSO.25		41	41	2	2	4

*Formulir 5. Risiko Prioritas*

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko				Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
1	Menurunnya nilai SAKIP	RSO.25		41	41	1	KEC. PEKUNCEN	Belum Tersusunnya SOP Evaluasi Kinerja Harian	Pelaksanaan Evaluasi kurang memadai dikarenakan tidak adanya standar / pedoman yang jelas
2	Adanya pungli dalam pemberian layanan kepada masyarakat	RSO.25		41	41	4	KEC. PEKUNCEN	Penyalahgunaan wewenang dalam melaksanakan tugas PPATK	Ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja kecamatan
3	Adanya urusan yang belum tertangani secara optimal	RSO.25		41	41	1	KEC. PEKUNCEN	Bertambahnya beban kerja pelayanan diluar tus/kewenangan	Ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja kecamatan
4	Belum optimalnya pembangunan di wilayah kecamatan	RSO.25		41	41	4	KEC. PEKUNCEN	Pengalokasian anggaran terbatas dan belum sesuai dengan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan	Ketidakpuasan masyarakat terhadap pembangunan di wilayah Kecamatan

Formulir 6. RTP Lipeng

NO	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Uraian Pengendalian yang Ada	Efektifitas	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
G	PERWUJUDAN PERAN APIP YANG EFEKTIF						
	LHE SAKIP	LHE SAKIP	KE	1	Mengadakan evaluasi kinerja internal secara berkala	Kepala OPD	Tahun 2025

[RTP STRATEGIS KECAMATAN PEKUNCEN TAHUN 2025]

*Formulir 7. RTP Resiko*

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	E/KE/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1	Menurunnya nilai SAKIP		Menjalin koordinasi dan kolaborasi antar bidang	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Mengadakan evaluasi kinerja internal secara berkala	Kepala OPD	Tahun 2025
2	Adanya pungli dalam pemberian layanan kepada masyarakat		Penandatanganan Pakta Integritas	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Menyusun kebijakan SK Maklumat Pelayanan, Penguatan Pakta Integritas	Kepala OPD	Tahun 2025
3	Adanya urusan yang belum tertangani secara optimal		Menjalin Koordinasi yang baik antar bidang	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Menyusun dan menata kembali evaluasi analisis beban kerja kecamatan, tugas dan fungsi serta peningkatan koordinasi dan komunikasi	Kepala OPD	Tahun 2025
4	Belum optimalnya pembangunan di wilayah kecamatan		Menjalin Koordinasi yang baik antar pelaku pembangunan	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Menjalin koordinasi yang bekesinambungan antar pelaku pembangunan, evaluasi menyeluruh dalam pengawasan, serta optimalisasi penggunaan anggaran	Kepala OPD	Tahun 2025

*Formulir 8. Informasi dan Komunikasi*

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Ket
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Mengadakan evaluasi kinerja internal secara berkala	Rapat Koordinasi	Kecamatan Pekuncen	Pegawai Kecamatan Pekuncen	Tahun 2025		
2	Menyusun kebijakan SK Maklumat Pelayanan, Penguatan Pakta Integritas	Rapat Koordinasi, Surat Pernyataan	Kecamatan Pekuncen	Pegawai Kecamatan Pekuncen	Tahun 2025		
3	Menyusun dan menata kembali evaluasi analisis beban kerja kecamatan, tugas dan fungsi serta peningkatan koordinasi dan komunikasi	Rapat Koordinasi	Kecamatan Pekuncen	Pegawai Kecamatan Pekuncen	Tahun 2025		
4	Menjalin koordinasi yang bekesinambungan antar pelaku pembangunan, evaluasi menyeluruh dalam pengawasan, serta optimalisasi penggunaan anggaran	Rapat Koordinasi	Kecamatan Pekuncen	Pegawai Kecamatan Pekuncen dan Pemerintahan Desa	Tahun 2025		

*Formulir 8. Informasi dan Komunikasi Pengendalian Intern*

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Mengadakan forum komunikasi secara rutin antar bidang	Rapat Koordinasi dan Evaluasi	Kecamatan Pekuncen	Seluruh Pegawai Kecamatan Pekuncen	Tahun 2025		

*Formulir 9. Pemantauan*

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pemantauan	Realisasi Waktu Pemantauan	Ke
a	b	c	d	e	f	g
1	Mengadakan evaluasi kinerja internal secara berkala	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP	Kepala OPD	Tahun 2025		
2	Menyusun kebijakan SK Maklumat Pelayanan, Penguatan Pakta Integritas	Laporan evaluasi pelayanan dan pernyataan pakta integritas	Kepala OPD	Tahun 2025		
3	Menyusun dan menata kembali evaluasi analisis beban kerja kecamatan, tugas dan fungsi serta peningkatan koordinasi dan komunikasi	Laporan evaluasi analisis beban kerja	Kepala OPD	Tahun 2025		
4	Menjalin koordinasi yang bekesinambungan antar pelaku pembangunan, evaluasi menyeluruh dalam pengawasan, serta optimalisasi penggunaan anggaran	Laporan Evaluasi Kegiatan Monitoring Pembangunan	Kepala OPD	Tahun 2025		

*Formulir 9. Pemantauan Atas Pengendalian Intern*

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pemantauan	Realisasi Waktu Pemantauan	Ket
a	b	c	d	e	f	g
1	Mengadakan forum komunikasi secara rutin antar bidang	Rapat Koordinasi Tindak Lanjut LHE	Kepala OPD	Tahun 2025		

[RTP STRATEGIS KECAMATAN PEKUNCEN TAHUN 2025]

Formulir 10. Risk Event

No	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	k	k
1	Menurunnya nilai SAKIP	RSO.21..41.41					Mengadakan evaluasi kinerja internal secara berkala	Tahun 2025		
2	Adanya pungli dalam pemberian layanan kepada masyarakat	RSO.21..41.41					Menyusun kebijakan SK Maklumat Pelayanan, Penguatan Pakta Integritas	Tahun 2025		
3	Adanya urusan yang belum tertangani secara optimal	RSO.21..41.41					Menyusun dan menata kembali evaluasi analisis beban kerja kecamatan, tugas dan fungsi serta peningkatan koordinasi dan komunikasi	Tahun 2025		
4	Belum optimalnya pembangunan di wilayah kecamatan	RSO.21..41.41					Menjalin koordinasi yang bekesinambungan antar pelaku pembangunan, evaluasi menyeluruh dalam pengawasan, serta optimalisasi penggunaan anggaran	Tahun 2025		

Formular 10. Pencatatan Kejadian Resiko

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
a	b	c	d	e
1	Mengadakan forum komunikasi secara rutin antar bidang	Tahun 2025		